

## KATA PENGANTAR

### **Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, dan merupakan salah satu pilar ekonomi, selayaknya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Di sisi lain, salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan dilakukan melalui program-program pemberdayaan ekonomi rakyat. Dengan demikian, melalui pemberdayaan koperasi diharapkan akan mendukung upaya pemerintah tersebut. Dalam upayanya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dituntut untuk dapat menghasilkan program dan kebijakan yang dapat mendukung tumbuh dan berkembangnya koperasi.

Untuk dapat menghasilkan kebijakan pemberdayaan koperasi yang tepat, diperlukan adanya dukungan data yang akurat dan aktual yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya dilapangan, sehingga dari data yang ada akan tergambar potret pembinaan koperasi yang memerlukan dukungan pembinaan lebih lanjut. Dalam kaitan dengan hal tersebut, Kementerian Negara Koperasi dan UKM berusaha untuk menyajikan data dan informasi perkoperasian yang dibutuhkan, khususnya data dan informasi perkembangan perkoperasian di Indonesia melalui penyusunan Statistik Perkoperasian Tahun 2007. Dalam buku ini memuat gambaran tentang angka dan grafik perkembangan kelembagaan dan usaha perkoperasian nasional dari tahun 2005 hingga 2006.

Akhir kata, ketersediaan data dan informasi dalam buku ini, diharapkan dapat menjadi bahan analisa dan referensi terhadap berbagai hal yang terkait dalam kebijakan pengembangan dan pembinaan perkoperasian di tanah air.

### **Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Sekretaris  
Kementerian Negara

Guritno Kusumo

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Pengertian dan Batasan.....	1
Sumber dan Cara Pengumpulan Data .....	2
Perkembangan Kelembagaan Koperasi Secara Nasional Periode 2005-2006	2
Perkembangan Usaha Koperasi Secara Nasional Periode 2005-2006	8
Lampiran-lampiran	

## PENGERTIAN DAN BATASAN

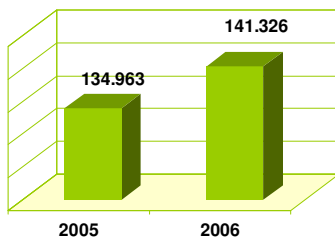
- a. **Koperasi** adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
- b. **Perkoperasian** adalah sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
- c. **Koperasi Aktif** adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.
- d. **Anggota Koperasi** adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi serta tercatat dalam buku daftar anggota.
- e. **Rapat Anggota Tahunan (RAT)** adalah rapat anggota koperasi yang pelaksanaannya sesuai dengan AD/ART koperasi.
- f. **Manager** adalah orang yang di angkat oleh pengurus untuk mengelola usaha koperasi.
- g. **Karyawan** adalah orang yang dipekerjakan koperasi baik dalam menangani organisasi maupun usaha dan mendapatkan gaji dari koperasi.
- h. **Modal Sendiri** adalah modal yang menanggung resiko (modal equity) atau merupakan kumulatif dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah.
- i. **Modal Luar** adalah modal yang dipinjam koperasi yang berasal dari anggota, koperasi lainnya, bank/lembaga keuangan, penerbitan obligasi/surat berharga dan sumber-sumber lainnya.
- j. **Volume Usaha** adalah total nilai penjualan/pendapatan barang dan jasa pada tahun buku yang bersangkutan.
- k. **Sisa hasil Usaha (SHU)** adalah pendapatan koperasi yang di peroleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku, yang bersangkutan.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Data dalam buku ini bersumber dari laporan Dinas/Badan/Instansi yang membidangi pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) seluruh Indonesia.

## PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN KOPERASI SECARA NASIONAL PERIODE 2005-2006

Grafik 1. Jumlah koperasi tahun 2005 - 2006 (dalam unit)



Kelembagaan Koperasi periode 2005 – 2006 mengalami perkembangan secara signifikan dengan laju perkembangan sebanyak 6.363 unit atau 4,71 persen.

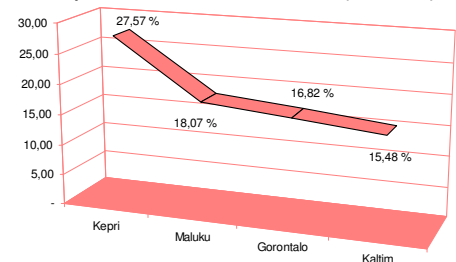
**Terdapat 4 (empat) propinsi dengan peningkatan jumlah koperasi terbesar (di atas 15 persen) periode 2005-2006** adalah :

- ▲ Kepulauan Riau sebesar 27,57

persen;

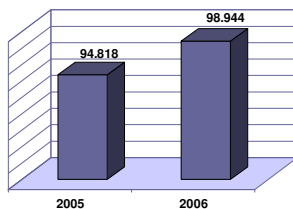
- ▲ Maluku sebesar 18,07 persen;
- ▲ Gorontalo sebesar 16,82 persen; dan
- ▲ Kalimantan Timur sebesar 15,48 persen.

Grafik 2. Propinsi dengan Peningkatan Jumlah Koperasi terbesar Periode 2005-2006 (diatas 15%)



- ▼ Sedangkan propinsi yang mengalami **penurunan jumlah koperasi** adalah Papua Barat sebesar 12,18 persen.

Grafik 3. Jumlah koperasi Aktif tahun 2005 - 2006 (dalam unit)

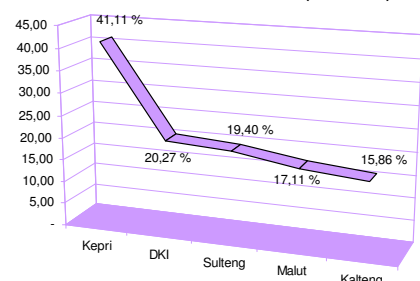


Perkembangan jumlah koperasi aktif untuk periode yang sama secara nasional, tercatat mengalami peningkatan sebanyak 4.126 unit atau 4,35 persen.

**Ada 5 (lima) propinsi dengan peningkatan jumlah koperasi aktif terbesar (di atas 15 persen)** adalah :

- ▲ Kepulauan Riau sebesar 41,11 persen;
- ▲ DKI Jakarta sebesar 20,27 persen;
- ▲ Sulawesi Tengah sebesar 19,40 persen
- ▲ Maluku Utara sebesar 17,11 persen; dan
- ▲ Kalimantan Tengah sebesar 15,86 persen.

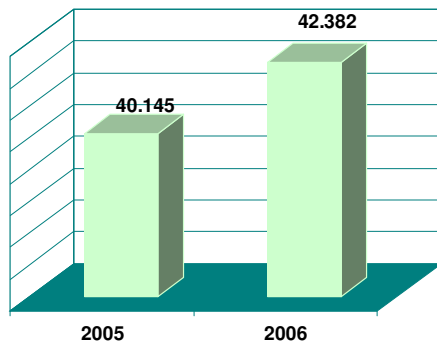
Grafik 4. Propinsi dengan Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif terbesar Periode 2005-2006 (diatas 15%)



Propinsi dengan **penurunan jumlah koperasi aktif** secara berturut-turut adalah :

- ▼ Papua Barat sebesar 12,98 persen;
- ▼ Banten sebesar 10,63 persen;
- ▼ Kalimantan Timur sebesar 7,18 persen;
- ▼ Lampung sebesar 3,31 persen;
- ▼ Sulawesi Utara sebesar 1,75 persen;
- ▼ Jambi sebesar 0,49 persen; dan
- ▼ Riau sebesar 0,11 persen.

Grafik 5. Jumlah koperasi Tidak Aktif tahun 2005 - 2006 (dalam unit)



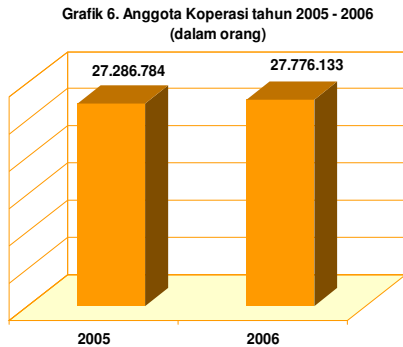
Sedangkan perkembangan jumlah koperasi tidak aktif secara nasional tercatat sebanyak 2.237 unit atau 5,57 persen. **Propinsi dengan peningkatan jumlah koperasi tidak aktif terbesar (diatas 50 persen)**, adalah :

- ▲ Kalimantan Timur sebesar 254, 31 persen;
- ▲ Maluku sebesar 52,63 persen; dan
- ▲ Gorontalo sebesar 52,41 persen.

Propinsi yang mengalami **penurunan jumlah koperasi tidak aktif**, adalah :

- ▼ DKI Jakarta sebesar 19,36 persen;
- ▼ Jawa Timur sebesar 16,31 persen;
- ▼ Papua Barat sebesar 11,43 persen;
- ▼ Kalimantan Tengah sebesar 9,52 persen;
- ▼ Bali sebesar 9,27 persen;
- ▼ Sulawesi Tengah sebesar 6,67 persen; dan
- ▼ Nusa Tenggara Barat sebesar 4,63 persen.

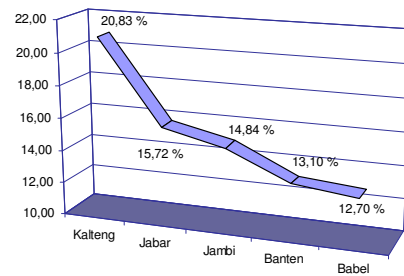
Gambaran rinci perkembangan jumlah koperasi, koperasi aktif dan koperasi tidak aktif disajikan pada tabel-1.



Perkembangan jumlah anggota koperasi periode 2005-2006 mengalami **peningkatan** sebanyak 489.349 orang atau 1,79 persen. **Propinsi Kepulauan Riau** memberikan kontribusi terbesar dalam peningkatan jumlah anggota koperasi aktif, yaitu mencapai 107,58 persen. Sedangkan propinsi lainnya, perkembangan jumlah anggota cukup berfluktuatif. **Propinsi dengan peningkatan jumlah anggota terbesar (di atas 12 persen)** adalah :

- ▲ Kalimantan Tengah sebesar 20,83 persen;
- ▲ Jawa Barat sebesar 15,72 persen;
- ▲ Jambi sebesar 14,84 persen;
- ▲ Banten sebesar 13,10 persen; dan
- ▲ Bangka Belitung sebesar 12,70 persen.

Grafik 7. Propinsi dengan peningkatan Keanggotaan Koperasi terbesar Periode 2005-2006 (di atas 12%)



Sedangkan propinsi yang mengalami **penurunan jumlah anggota terbesar** adalah:

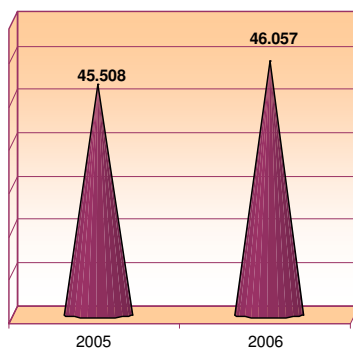
- ▼ Maluku sebesar 48,28 persen;
- ▼ DKI Jakarta sebesar 37,76 persen;
- ▼ Riau sebesar 7,01 persen;
- ▼ Papua Barat sebesar 6,70 persen;
- ▼ Sumatera Utara sebesar 6,38 persen;
- ▼ Sulawesi Tenggara sebesar 4,26 persen;
- ▼ Bengkulu sebesar 4,12 persen;
- ▼ Jawa Timur sebesar 4,02 persen;
- ▼ Papua sebesar 3,78 persen;
- ▼ Sulawesi Utara sebesar 0,44 persen; dan
- ▼ Kalimantan Selatan sebesar 0,41 persen.

Gambaran rinci perkembangan jumlah anggota koperasi disajikan pada tabel-2.

Hal menarik yang menjadi catatan dalam menganalisis perkembangan jumlah koperasi, koperasi aktif, koperasi tidak aktif dan perkembangan jumlah anggota. Propinsi dengan pertumbuhan jumlah koperasi aktif terbesar tidak selalu diikuti menjadi propinsi dengan pertumbuhan jumlah anggota koperasi aktif terbesar. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa peningkatan jumlah koperasi aktif juga dibarengi dengan peningkatan jumlah koperasi tidak aktif. Sehingga pertumbuhan anggota koperasi dimungkinkan karena sebagian besar disumbang oleh tumbuhnya koperasi baru, bukan dari berkembangnya koperasi tidak aktif menjadi aktif.

Disisi lain dengan adanya otonomi daerah yang berdampak terjadinya pemekaran daerah kabupaten/kota, sehingga berdampak juga pada terkendalanya laporan perkembangan koperasi dari daerah mengingat percepatan pembentukan badan/instansi yang membidangi koperasi di daerah tidak berjalan dengan baik. Kabupaten/kota hasil pemekaran biasanya akan mengalami masa transisi pemerintahan, yang kemudian akan berdampak kepada pembinaan lembaga dan penyampaian laporan kinerja koperasi ke propinsi. Untuk lebih spesifik perlu dilakukan kajian lebih lanjut.

Grafik 8. Pelaksanaan RAT Koperasi  
Tahun 2005 - 2006 (dalam unit)

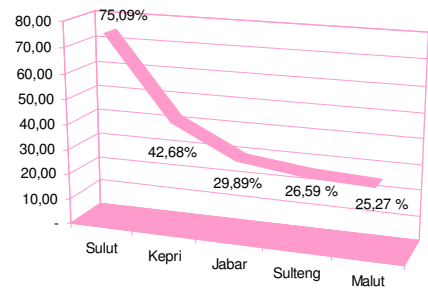


Dengan melihat perkembangan kelembagaan yang ada, terlihat bahwa animo masyarakat terhadap keberadaan koperasi mulai meningkat terutama pada daerah-daerah yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Indikator peningkatan animo masyarakat terhadap keberadaan koperasi juga dibarengi dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam berkoperasi, hal ini dapat terlihat juga pada pelaksanaan RAT, dimana pada periode 2005 – 2006 pelaksanaan RAT mengalami peningkatan sebanyak 549 unit koperasi atau 1,21 persen; dari 45.508 unit pada tahun 2005 menjadi 46.057 unit pada tahun 2006.

**Propinsi dengan peningkatan pelaksanaan RAT terbesar (diatas 25 persen) adalah :**

- ▲ Sulawesi Utara sebesar 75,09 persen;
- ▲ Kepulauan Riau sebesar 42,68 persen;
- ▲ Jawa Barat sebesar 29,89 persen;
- ▲ Sulawesi Tengah sebesar 26,59 persen; dan
- ▲ Maluku Utara sebesar 25,27 persen.

Grifik 9. Propinsi dengan Peningkatan RAT Koperasi terbesar Periode 2004-2005 (diatas 30%)

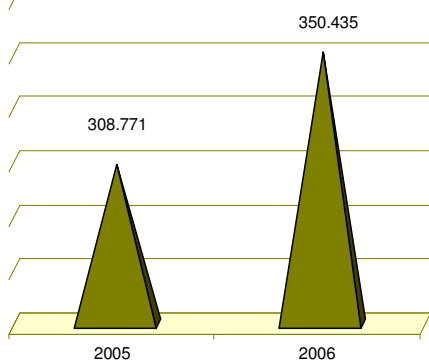


**Sedangkan 11 (sebelas) propinsi lainnya mengalami penurunan pelaksanaan RAT koperasi, yaitu :**

- ▼ Banten sebesar 52,97 persen; dan
- ▼ DKI Jakarta sebesar 38,54 persen;
- ▼ Jambi sebesar 28,51 persen;
- ▼ Riau sebesar 16,68 persen;
- ▼ Bengkulu sebesar 16,49 persen;
- ▼ Bali sebesar 11,56 persen;
- ▼ Sumatera Utara sebesar 6,54 persen;
- ▼ Papua Barat sebesar 4,03 persen;
- ▼ Sulawesi Selatan sebesar 2,44 persen;
- ▼ Kalimantan Timur sebesar 0,19 persen; dan
- ▼ Nusa Tenggara Timur sebesar 0,12 persen.

Gambaran rinci pelaksanaan RAT disajikan pada tabel-3.

Grifik 10. Penyerapan Tenaga Kerja oleh Koperasi Tahun 2005 - 2006 (dalam orang)



Dari empat indikator perkembangan koperasi yang telah dijelaskan, keberadaan koperasi sebagai badan usaha di seluruh daerah diharapkan dapat memberikan peluang bagi terbukanya lapangan kerja baru di sebagian anggota masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan **perkembangan penyerapan tenaga kerja oleh koperasi** periode 2005-2006 secara nasional yang mengalami peningkatan sebanyak 41.664 orang atau 13,49 persen; dari

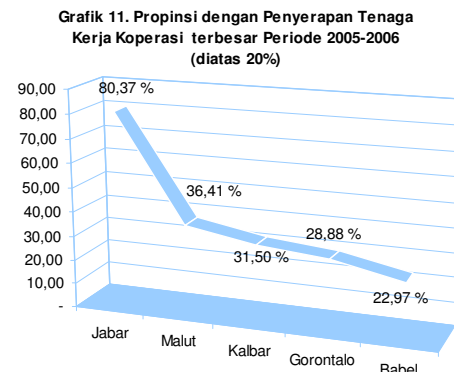
308.771 orang (28.736 manajer dan 280.035 karyawan) pada tahun 2005 menjadi 350.435 orang (31.963 manajer dan 318.472 karyawan) pada tahun 2006. Kontribusi terbesar propinsi dalam penyerapan tenaga kerja oleh koperasi hanya terjadi di propinsi **Sumatera Barat**, yaitu mencapai 177,58 persen. Sedangkan propinsi lainnya berfluktuatif. **Lima propinsi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja koperasi terbesar (di atas 20 persen)**, adalah :

- ▲ Jawa Barat sebesar 80,37 persen;
- ▲ Maluku Utara sebesar 36,41 persen;
- ▲ Kalimantan Barat sebesar 31,50 persen;
- ▲ Gorontalo sebesar 28,88 persen; dan
- ▲ Bangka Belitung sebesar 22,97 persen.

Walaupun secara nasional terjadi peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja, namun masih

terdapat beberapa **propinsi yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja koperasi** seperti;

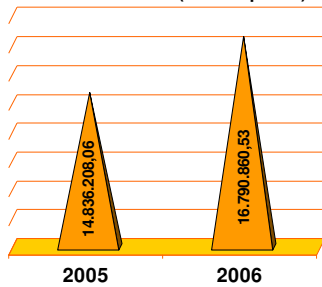
- ▼ Jambi sebesar 15,60 persen;
- ▼ DKI Jakarta sebesar 9,83 persen;
- ▼ Kalimantan Tengah sebesar 9,41 persen;
- ▼ N. Aceh Darussalam sebesar 8,63 persen;
- ▼ Sumatera Selatan sebesar 8,47 persen;
- ▼ Sulawesi Tenggara sebesar 8,32 persen;
- ▼ Sulawesi Utara sebesar 4,85 persen;
- ▼ Kalimantan Selatan sebesar 4,43 persen;
- ▼ Jawa Tengah sebesar 3,34 persen;
- ▼ Kepulauan Riau sebesar 2,40 persen;
- ▼ Banten sebesar 0,88 persen;
- ▼ Kalimantan Timur sebesar 0,46 persen;
- ▼ Jawa Timur sebesar 0,15 persen; dan
- ▼ Bengkulu sebesar 0,12 persen.



Gambaran rinci perkembangan penyerapan tenaga kerja koperasi disajikan tabel-4.

## PERKEMBANGAN USAHA KOPERASI SECARA NASIONAL PERIODE 2004-2005

Grafik 12. Modal Sendiri Koperasi Tahun 2005 - 2006 (dalam Rp Juta)

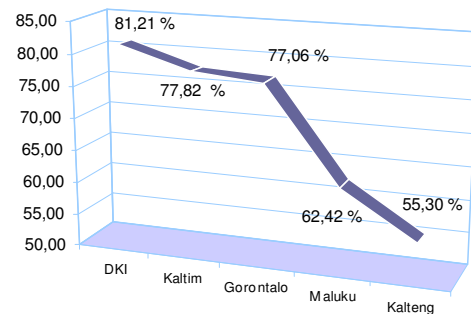


Perkembangan usaha koperasi yang dicerminkan oleh indikator keuangan koperasi seperti, modal sendiri, modal luar, volume usaha dan sisa hasil usaha koperasi periode 2005 – 2006 memberikan gambaran perkembangan yang tidak jauh berbeda dengan perkembangan kelembagaan. **Modal sendiri** koperasi **meningkat sebesar Rp. 1.954.652,48 juta atau**

**13,17 persen. Propinsi dengan peningkatan jumlah modal sendiri koperasi terbesar (di atas 50 persen) adalah :**

- ▲ DKI Jakarta sebesar 81,21 persen;
- ▲ Kalimantan Timur sebesar 77,82 persen;
- ▲ Gorontalo sebesar 77,06 persen;
- ▲ Maluku sebesar 62,42 persen; dan
- ▲ Kalimantan Tengah sebesar 55,30 persen.

Grafik 13. Propinsi dengan peningkatan modal sendiri Koperasi terbesar Periode 2005-2006 (diatas 50%)



Sedangkan propinsi dengan **penurunan**

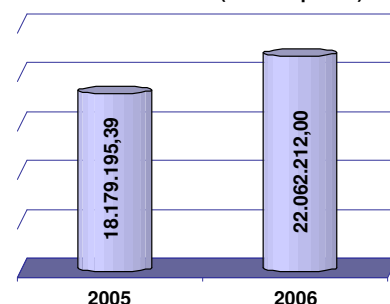
**modal sendiri koperasi** adalah :

- ▼ Jambi sebesar 84,74 persen;
- ▼ Sulawesi Utara sebesar 17,89 persen;
- ▼ Maluku Utara sebesar 14,79 persen;
- ▼ Riau sebesar 10,90 persen; dan
- ▼ Papua sebesar 5,18 persen.

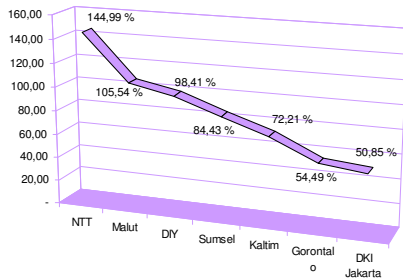
Gambaran rinci perkembangan modal sendiri koperasi aktif disajikan tabel-5.

Dalam hal **modal luar koperasi**, pada periode yang sama perkembangan **modal luar koperasi** secara nasional mengalami peningkatan **21,36 persen** atau Rp. 3.883.016,62 juta; dari Rp. 18.179.195,39 pada tahun 2005 menjadi Rp. 22.062.212,00 juta.

Grafik 14. Modal Luar Koperasi Tahun 2005 - 2006 (dalam Rp Juta)



Grafik 15. Propinsi dengan peningkatan modal luar Koperasi terbesar Periode 2005-2006 (diatas 50%)



**Propinsi dengan peningkatan jumlah modal luar koperasi terbesar (di atas 50 persen) adalah:**

- ▲ Nusa Tenggara Timur sebesar 144,99 persen;
- ▲ Maluku Utara sebesar 105,54 persen;
- ▲ DI Yogyakarta sebesar 98,41 persen;
- ▲ Sumatera Selatan sebesar 84,43 persen;
- ▲ Kalimantan Timur sebesar 72,21 persen;
- ▲ Gorontalo sebesar 54,49 persen; dan
- ▲ DKI Jakarta sebesar 50,85 persen.

**Sedangkan propinsi dengan penurunan jumlah modal luar koperasi adalah :**

- ▼ Kalimantan Tengah sebesar 60,07 persen;
- ▼ Kepulauan Riau sebesar 33,87 persen;
- ▼ Maluku sebesar 45,44 persen;
- ▼ Banten sebesar 25,51 persen;
- ▼ Riau sebesar 22,73 persen;
- ▼ Jambi sebesar 6,46 persen;
- ▼ Sulawesi Tenggara sebesar 2,57 persen; dan
- ▼ Kepulauan Riau sebesar 0,004 persen.

Gambaran rinci perkembangan modal luar koperasi aktif disajikan tabel-6.

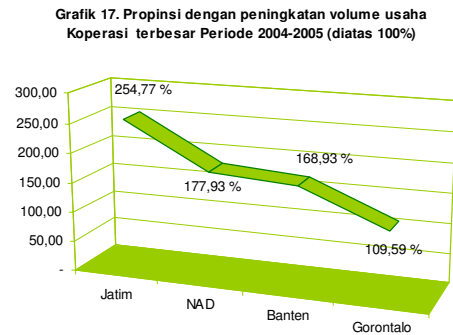
Disisi lain, **perkembangan transaksi usaha koperasi** yang dicerminkan oleh besarnya nilai **volume usaha** koperasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 53,60 persen atau Rp. 21.886.806,22 juta.

Grafik 16. Volume Usaha Koperasi Tahun 2005 - 2006 (dalam Rp Juta)



Terdapat **4 (empat) propinsi dengan peningkatan volume usaha koperasi terbesar (di atas 100 persen)** yaitu :

- ▲ Jawa Timur sebesar 254,77 persen;
- ▲ Nanggroe Aceh Darussalam sebesar 177,93 persen;
- ▲ Banten sebesar 168,93 persen; dan
- ▲ Gorontalo sebesar 109,59 persen.



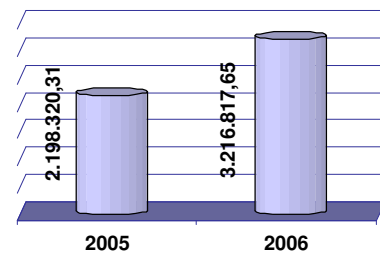
Namun demikian terdapat **beberapa propinsi yang mengalami penurunan jumlah volume usaha koperasi**, diantaranya adalah :

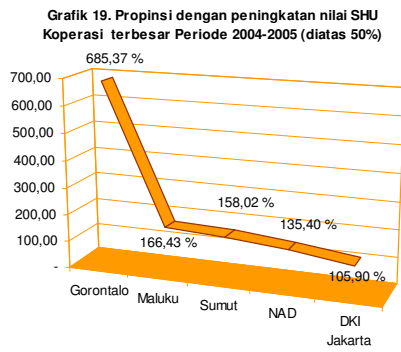
- ▼ Sulawesi Utara sebesar 47,64 persen;
- ▼ Jambi sebesar 42,50 persen;
- ▼ Riau sebesar 23,34 persen;
- ▼ Kepulauan Riau sebesar 13,87 persen;
- ▼ Sumatera Utara sebesar 7,68 persen; dan
- ▼ Nusa Tenggara Timur sebesar 4,39 persen.

Gambaran rinci perkembangan volume usaha koperasi aktif disajikan tabel-7.

Seiring dengan peningkatan volume usaha koperasi, **perkembangan Sisa Hasil Usaha (SHU)** koperasi nasional periode 2005-2006 mengalami peningkatan sebesar 46,33 persen atau Rp. 1.018.497,34 juta.

Grafik 18. Nilai SHU Koperasi Tahun 2005 - 2006 (dalam Rp Juta)





**Propinsi dengan peningkatan nilai SHU koperasi terbesar (di atas 100 persen) adalah:**

- ▲ Gorontalo sebesar 685,37 persen;
- ▲ Maluku sebesar 166,43 persen;
- ▲ Sumatera Utara sebesar 158,02 persen;
- ▲ N. Aceh Darussalam sebesar 135,40 persen;

dan

- ▲ DKI Jakarta sebesar 105,90 persen.

**Sedangkan propinsi dengan penurunan nilai SHU koperasi adalah :**

- ▼ Jambi sebesar 41,95 persen;
- ▼ Kalimantan Selatan sebesar 22,81 persen;
- ▼ Nusa Tenggara Timur sebesar 12,64 persen;
- ▼ Banten sebesar 3,05 persen; dan
- ▼ Kepulauan Riau sebesar 0,0004 persen.

Gambaran rinci perkembangan nilai SHU koperasi aktif disajikan tabel-8.